



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: RUU Terorisme Lamban Teroris Tertawa
: Sabtu, 12 Agustus 2017
: Media Indonesia
: 2

Penyebab lain kerajaan masih banyak menyatakan yang mudah terpecah bah dan minimnya kesadaran mereka akan pentingnya literasi finansial. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menunjukkan anggaran terhadap kegiatan finansial harta sekitar 29,6%. Bandingkan dengan indeks inklusi keuangan masyarakat pada 2016 yang mencapai 67,8%, itu artinya tingganya indeks terhadap lembaga keuangan tidak dibarengi dengan ketekunan dalam mengelola keuangan. Hal itu memunculkan masih banyak orang yang gak menggunakan hal-hal mereka ketika mendapat tawaran menggiurkan, padahal tak masuk akal.

Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Namun, yang tak kalah penting, aparat terkait meski meningkatkan daya etos dan kesigapan dalam mengawasi berbagai tigaan kegiatan finansial yang melibatkan masyarakat.

Hans kita ketahui, kasus First Travel terjadi jauh tak lepas dari lambannya pemerintahan untuk berhentikan. Bukanlah perusahaan itu sudah mulai memparah bisnis perjalanan ibadah umrah sejak 2017? Bukanlah First Travel secara sempura di bantayu media membebaskan tawaran umrah dengan biaya yang sangat jauh dari harga normal?

Berulah bahwa Kementerian Agama sebagai pemberi izin operasional sudah beberapa kali membangun First Travel, tetapi jika lebih jeli, dugaan perjudian ini rasanya bisa dihindari sejak dulu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini selain meski menyindir teges pelaku, yang tak kalah penting adalah menghindarkan korban dari kerugian.

First Travel harus dijasa memberangkatkan mereka ke Tanah Suci atau mengembalikan uang yang sang sudah disorotkan. Yang lebih penting lagi, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi rakyat untuk mengajepankan akal setiap kali berurusank dengan negara dan keluarga.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediamerdeka.com dan www.metrotvnews.com

www.mediamerdeka.com/editorials

www.mediamerdeka.com/editorials

waktu? Dari sisi pelaku, mereka sebenarnya tak perlu keleburan khusus. Yang dibutuhkan hanyalah keremanan dan tenekuan kan ketiganya dengan cara instan, murah, dan gampang. Sifat itulah yang membuat mereka anggap berpikir panjang apakah tawaran pelaku masuk akal atau tidak.

Hai itu pun yang membuat ribuan umat terperdaya oleh limbing umrah dengan biaya cuma sekira Rp14 juta yang ditawarkan First Travel. Padahal, normalnya, biaya untuk umrah punya tidak Rp19 juta. Memang, sebagian dari mereka bisa berangkat dengan biaya semurah itu, tetapi sebagian besar lainnya harus gigit jari kendati telan menyotokan uang.

Penyebab lain kerajaan masih banyak menyatakan yang mudah terpecah bah dan minimnya kesadaran mereka akan pentingnya literasi finansial. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menunjukkan anggaran terhadap kegiatan finansial harta sekitar 29,6%. Bandingkan dengan indeks inklusi keuangan masyarakat pada 2016 yang mencapai 67,8%, itu artinya tingganya indeks terhadap lembaga keuangan tidak dibarengi dengan ketekunan dalam mengelola keuangan. Hal itu memunculkan masih banyak orang yang gak menggunakan hal-hal mereka ketika mendapat tawaran menggiurkan, padahal tak masuk akal.

Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Namun, yang tak kalah penting, aparat terkait meski meningkatkan daya etos dan kesigapan dalam mengawasi berbagai tigaan kegiatan finansial yang melibatkan masyarakat.

Hans kita ketahui, kasus First Travel terjadi jauh tak lepas dari lambannya pemerintahan untuk berhentikan. Bukanlah perusahaan itu sudah mulai memparah bisnis perjalanan ibadah umrah sejak 2017? Bukanlah First Travel secara sempura di bantayu media membebaskan tawaran umrah dengan biaya yang sangat jauh dari harga normal?

Berulah bahwa Kementerian Agama sebagai pemberi izin operasional sudah beberapa kali membangun First Travel, tetapi jika lebih jeli, dugaan perjudian ini rasanya bisa dihindari sejak dulu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini selain meski menyindir teges pelaku, yang tak kalah penting adalah menghindarkan korban dari kerugian.

First Travel harus dijasa memberangkatkan mereka ke Tanah Suci atau mengembalikan uang yang sang sudah disorotkan. Yang lebih penting lagi, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi rakyat untuk mengajepankan akal setiap kali berurusank dengan negara dan keluarga.

Lambannya realisasi itu, imbau Wuranto, menjadi hal yang lucu dan mungkin ditertawakan kelompok teoris tersebut.

"Sudah lalu ada rencana bon, sudah ada informasi, tetapi saya langsung engak

**Perintahkan
terhadap aksi
terorisme tidak
bisa berdasarkan
KUHP, tetapi
dengan UU
khusus.**

**Godz Esa
godz@mediamerdeka.com**

Wuranto
Materi Koordinator
Bidang Politik Hu-
kum, dan Keamanan
Wiranto mengingatkan DPR
untuk segera menyelesaikan
pembahasan RUU Perubahan
atas UU Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pengembangan Tin-
dat Pidana Terorisme.

Martian Panglima TNI itu
menyatakan kelompok tero-

ris dalam melaraskan
maritzen DPR tolong deh,
Undang undangnya direvisi
segera, lanjutnya.

Wiranto mengajak nega-

ri-negara ASEAN untuk
menerangi siksi kejadian
terorisme. Menurutnya, ne-

gara-negara ASEAN harus
menggalang kerja sama dan
mempertkuat sinergi dalam

menertangi aincaman teror-

isme sati ini.

Wiranto mengaku sering
melobi para wakil rakyat

guru membicarakan per-

soalan tersebut, termasuk

Antiterorisme.

bisa. Undang-undang tidak
membolehkan nunggu di-
bom diu atau bukti, ada
kaitanya buku tangkap.
Undang undangnya begitu.

Gimana?" kata Wiranto ke-
tika memberikan ceramah
kepada peserta IPRA-LWI dan
pPSI XXI Tahun 2017 di Auditorium
Lemhanas, Jakarta, kemarin.

Wiranto
Menko Polhukam
Wiranto menegaskan bahwa
aksi terorisme sejatinya tidak
boleh dianggap sebagai ben-

ruk tindak pidana. Teorisme
memupuk kejadian yang
menyakiti dan merusak
pendidikan KUHP, tetapi perlu
dibuat dalam sebuah UU klu-

"ini yang kita harap te-
manten DPR tolong deh,
Undang undangnya direvisi
segera, lanjutnya.

Wiranto mengajak nega-

ri-negara ASEAN untuk
menerangi siksi kejadian
terorisme. Menurutnya, ne-

gara-negara ASEAN harus
menggalang kerja sama dan
mempertkuat sinergi dalam

menertangi aincaman teror-

isme sati ini.

Wiranto mengaku sering
melobi para wakil rakyat

guru membicarakan per-

Blok GM1 Nomor 25 RT/03/23,
Pakujaya, Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten,

kenarin.

"jadi Sudara SP ini meleg-
galang dana kemudian mem-
berangkatkan beberapa orang
keFilipinamatante Sunan," kata

Kepala Bagian Penerangan
Umum Polri Komisaris Besar

Martius Siompuul di Marks

Besar Polri kemarin.

Petugas menangkap SP seki-

tar pukul 06.30 WIB sesaat se-

lebihnya pagi pertemuan

tar pukul 06.30 WIB sesaat se-

lebihnya pagi pertemuan

tar pukul 06.30 WIB sesaat se-

Dua Depok untuk diperluka

lebih lanjut.

Sehari sebelumnya, Kamis

(10/8), Densus 88 juga me-

nangkan tiga orang terduga

teroris, bernisial S, 38, AR,

39, serta RB, 45, di Desa

Kasung, Kuning, Ulu Muaro,

Jambi.

Mereka ditangkap mengirim-

kan orang-orang ke Filipina

dan membuat bahan peledak.

Ketiganya diperiksa intensif

RUU Terorisme Lamban

Teroris Tertawa

[REDAKSI]

Blok GM1 Nomor 25 RT/03/23,
Pakujaya, Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten,

kenarin.

"jadi Sudara SP ini meleg-

galang dana kemudian mem-

berangkatkan beberapa orang
keFilipinamatante Sunan," kata

Kepala Bagian Penerangan
Umum Polri Komisaris Besar

Martius Siompuul di Marks

Besar Polri kemarin.